



Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu

Hesti Lira Despriyani ¹⁾; Antonio Imanda ²⁾; Yanuar Rikardo ³⁾

^{1,2,3)} *Study Program of Public Administration, Universitas Dehasen Bengkulu*

Email: ¹⁾ hestylira2@gmail.com, ²⁾ antonioimanda@unived.ac.id, ³⁾ yanuarrikardo@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received [30 Oktober 2024]

Revised [02 Desember 2024]

Accepted [04 Desember 2024]

KEYWORDS

Effectiveness, Family Hope Program Hope.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui “Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik Analisa data dengan cara reduksi data, penyajian data dan penarikan Kesimpulan. Informan dalam penelitian ini berjumlah 6 orang yang terdiri dari 2 orang informan kunci dan 4 orang informan pokok. Teori yang dalam penelitian ini adalah teori efektivitas menurut Budiani (Dalam Nuraida 2019:155), ada 4 aspek yang digunakan yaitu Ketepatan Sasaran Program, Sosialisasi Program, Tujuan Program, dan Pemantauan Program. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik Kesimpulan yakni: 1. Ketepatan Sasaran: a. Target penerima Program Keluarga Harapan ini yaitu keluarga miskin yang memenuhi kriteria tertentu dan membutuhkan bantuan sosial untuk meningkatkan taraf hidup mereka, dimana target penerima PKH sesuai dengan kriteria penerima. b. Sasaran yang dituju yaitu kelompok atau individu yang menjadi target utama dari suatu program kegiatan atau intervensi. Dalam konteks Program Keluarga Harapan sasaran yang dituju adalah masyarakat yang kurang mampu atau miskin. Namun, Program Keluarga Harapan di Kecamatan Ratu Agung belum berjalan dengan cukup efektif karena program belum seluruhnya tepat dengan sasaran. 2. Sosialisasi program: a. Waktu sosialisasi yaitu waktu pelaksanaan kegiatan sosialisasi dilakukan setiap satu kali dalam satu bulan pertemuan dengan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang didampingi oleh pendamping PKH. kegiatan sosialisasi ini sudah berjalan dengan cukup efektif. b. Tujuan sosialisasi yaitu P2K2 (pertemuan peningkatan kemampuan keluarga). 3. Tujuan Program: tujuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu yaitu untuk mensejahterakan masyarakat yang ekonominya masih rendah dan memutus rantai kemiskinan, namun tujuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu belum berjalan dengan efektif karena program ini belum mencapai tujuannya utamanya. Hal ini dilihat dari sasaran penerima bantuan PKH, masih banyak masyarakat yang kurang mampu yang memang berhak mendapat bantuan Program Keluarga Harapan. 4. Pemantauan Program: Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu sejauh ini sudah berjalan dengan cukup efektif.

ABSTRACT

This study aims to determine the “Effectiveness of Program Keluarga Harapan (PKH) in Ratu Agung Sub-District, Bengkulu City. The method used in this research is descriptive qualitative method. Data collection techniques are carried out by means of observation, interviews, and documentation. Data analysis techniques by means of data reduction, data presentation and make conclusion. The informants in this study amounted to 6 people consisting of 2 key informants and 4 main informants. The theory in this study is the theory of effectiveness according to Budiani (in Nuraida 2019: 155), there are 4 aspects used, namely Program Target Accuracy, Program Socialization, Program Objectives, and Program Monitoring. Based on the research results, conclusions can be drawn, namely: 1. Target Accuracy: a. The target recipients of PKH are poor families who meet certain criteria and need social assistance to improve their standard of living, where the PKH target recipients are in accordance with the recipient criteria. b. The intended target is the group or individual who is the main target of an activity or intervention program. In the context of PKH, the intended target is the underprivileged or poor community. However, PKH in Ratu Agung Sub-District has not been running effectively because the program has not been entirely targeted. 2. Program socialization: a. The time of socialization, namely the time of implementation of socialization activities, is carried out every once in a month meeting with Beneficiary Families (KPM) accompanied by PKH assistants. this socialization activity has been running quite effectively. b. The purpose of socialization, namely P2K2 (family capacity building meeting). 3. Program Objectives: The purpose of PKH in Ratu Agung Sub-district, Bengkulu City is to prosper people whose economy is still low and break the chain of poverty, but the objectives of PKH in Ratu Agung Sub-district, Bengkulu City have not been effective because this program has not achieved its main objectives. This can be seen from PKH beneficiary targets, there are still many underprivileged people who are entitled to receive assistance from PKH. 4. Program Monitoring: The implementation of the PKH in Ratu Agung Sub-district, Bengkulu City has so far been running quite effectively.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang memiliki jumlah penduduk yang begitu banyak dengan jumlah pulau sebesar 17.000 yang ada di negara ini. Jumlah penduduk yang begitu banyak dan wilayah yang begitu luas serta terpisahkan oleh lautan tentu tidak lepas dari berbagai kendala dalam rangka untuk mewujudkan amanat dalam Undang-Undang Dasar 1945 untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kesejahteraan negara adalah cita-cita luhur dari *founding father* kita. Kemerdekaan bukan saja bermakna kebebasan dari penjajah, lebih dari itu adalah tercapainya masyarakat yang adil dan makmur.

Terbebas dari belenggu kemiskinan di Indonesia, masalah kemiskinan masih menjadi sorotan utama kita terkait dengan usaha-usaha pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan sosial Indonesia. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tertuang amanat konstitusi, bahwa upaya penanggulangan kemiskinan merupakan perlindungan segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. (Purwanto & Makmur, 2013:79). Kemiskinan yang terjadi diberbagai wilayah yang ada di Indonesia menjadi masalah yang utama yang dihadapi oleh negara Indonesia.

Masalah kemiskinan merupakan fenomena sosial masyarakat yang terdapat di berbagai daerah maupun provinsi oleh karena itu berbagai kebijakan pemberdayaan masyarakat yang langsung menyentuh kebutuhan hidup masyarakat yang miskin. Memberdayakan masyarakat merupakan upaya pengentasan masyarakat yang miskin untuk mandiri, baik itu secara ekonomi maupun aspek kehidupan yang lain, sehingga memerlukan kebijakan yang khusus dan sinergi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat dalam memberdayakan masyarakat miskin (Utomo et al, 2014:22).

Menurut Niemietz dalam Maipita (2014:9), kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk membeli barang-barang kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, papan dan obat-obatan. Sedangkan badan pusat statistik (2016) mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Kemudian menurut Kuncoro dalam Tyas (2016:11) kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup minimum. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kemiskinan adalah suatu keadaan dimana seseorang atau daerah tidak dapat meningkatkan kehidupan yang lebih layak atau dapat dikatakan tidak dapat meningkatkan standar hidup yang lebih baik. Adapun indikator kemiskinan menurut Badan Pusat Statistik, indikator yang terdiri dari (Badan Pusat Statistik, 2016):

1. *Head Count Index*, yaitu persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan.
2. *Proverty Gap Index* (indeks kedalaman kemiskinan), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan.
3. *Proverty Severity Indeks* (indeks keparahan kemiskinan), merupakan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin.

Dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No.01 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan Pemerintah Indonesia telah melaksanakan Program Bantuan Tunai Bersyarat (BTB) yang saat ini dikenal dengan nama Program Keluarga Harapan (PKH) pada tahun 2007 adalah Program yang memberikan bantuan terhadap masyarakat yang kurang mampu atau memiliki ekonomi yang terbatas dengan memberikan bantuan berupa uang tunai.

PKH lebih dimaksud dengan upaya pembangun sistem perlindungan sosial penduduk miskin sekaligus sebagai upaya untuk memutuskan rantai kemiskinan yang menjadi masalah yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia. Dengan adanya Program Keluarga Harapan (PKH) ini sangat bermanfaat bagi orang banyak karena Program ini sangat membantu masyarakat yang kurang mampu atau masyarakat yang kurang berkecukupan.

Dari permasalahan tersebut Kementerian Sosial berperan penting dalam menyelenggarakan urusan dibidang rehabilitas sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintah, negara, dan inklusivitas.

Oleh karena itu disetiap Provinsi di Indonesia Pelayanan Program Keluarga Harapan (PKH) bisa dilakukan melalui layanan pada Dinas Sosial salah satunya Dinas Sosial Kota Bengkulu. Berdasarkan hasil dari observasi awal yang penulis dapatkan bahwa Dinas Sosial (DINSOS) Kota Bengkulu merupakan instansi pemerintah yang memiliki peran dalam meningkatkan kualitas kesejahteraan sosial perorangan, kelompok dan Masyarakat. Dinas Sosial Kota Bengkulu mempunyai tugas membantu bupati dalam melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas



pembantuan yang diberikan kepada daerah di bidang sosial. Dinas Sosial Kota Bengkulu saat ini memiliki berbagai produk Pelayanan Publik dengan mengeluarkan kebijakan untuk menambah pengetahuan Masyarakat. Kebijakan yang dilakukan Dinas Sosial Kota Bengkulu salah satunya yaitu pelayanan terkait Program Keluarga Harapan (PKH). Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan bantuan dari perlindungan sosial yang termasuk dalam kluster pertama strategi penanggulangan kemiskinan di Indonesia.

Program ini merupakan bantuan bersyarat dan disesuaikan dengan persyaratan Pendidikan dan Kesehatan. Kesenambungan dari program ini akan berkontribusi dalam mempercepat pencapaian tujuan Pembangunan milenium (*Millennium Development Goals* atau *MGDs*). Setidaknya ada 5 komponen tujuan MDGs yang didukung melalui PKH, yaitu penanggulangan kemiskinan ekstrim dan kelaparan, pencapaian Pendidikan untuk semua, kesetaraan gender dan pemberdayaan Perempuan, pengurangan angka kematian anak, dan peningkatan Kesehatan ibu. *Millennium development goals* (MGDs) sebagai tujuan Pembangunan milenium (TPM).

Tujuan Pembangunan milenium merupakan paradigma Pembangunan global yang disepakati secara internasional oleh 189 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Milenium PBB bulan September 2000 silam. Majelis umum PBB kemudian melegalkannya ke dalam resolusi majelis umum perserikatan bangsa-bangsa Nomor 55/22 tanggal 18 September 2000 tentang Deklarasi Milenium Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB) (*A/RES/55/22. United Nations Millennium Declaration*).

Program Keluarga Harapan (PKH) dilaksanakan oleh UPPKH Pusat, UPPKH Kabupaten/Kota dan Pendamping PKH. Masing-masing pelaksana memegang peran penting masing-masing dalam menjamin keberhasilan dari bantuan PKH, Di mana UPPKH Pusat merupakan badan yang merancang atau mengelola persiapan dan pelaksanaan program, dan UPPKH Kabupaten/Kota badan yang berperan untuk memastikan bahwa alur informasi yang diterima dari kecamatan ke pusat dapat berjalan dengan baik dan lancar, sedangkan Pendamping PKH merupakan pihak kunci yang menjembatani penerima manfaat dengan pihak lain.

Adapun kriteria penerima Program Keluarga Harapan (PKH):

1. Kriteria penerima PKH Kesehatan: Ibu hamil atau menyusui, dengan Batasan maksimal dua kali kehamilan dan anak usia 0-6 tahun, dengan batasan maksimal dua anak.
2. Kriteria penerima PKH Pendidikan: Anak Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), atau Tingkat pendidikan yang setara, Anak Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah atau tingkat pendidikan yang setara. Anak Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah atau tingkat pendidikan yang setara. Anak Usia 6-12 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar selama 12 tahun.
3. Kriteria penerima PKH Sosial: Lanjut usia di atas 60 tahun, dengan batasan maksimal 1 orang dalam satu keluarga dan penyandang disabilitas, dengan prioritas pada penyandang disabilitas berat serta Batasan maksimal 1 orang dalam satu keluarga.

Program Keluarga Harapan (PKH) untuk mendapatkannya tidaklah rumit Masyarakat yang memenuhi kriteria dapat mengajukan permohonan mendapatkan bantuan sosial melalui PKH mendaftar secara *online* dengan mengunduh aplikasi Cek Bansos, lakukan registrasi untuk membuat akun baru dan lengkapi informasi pribadi, setelah pendaftaran selesai akan diarahkan ke halaman utama aplikasi. Pilih opsi daftar usulan, selanjutnya pilih tambah usulan dan isi data pribadi serta pilih jenis bantuan sosial PKH yang sesuai.

Setelah menyelesaikan proses pendaftaran, perlu menunggu proses verifikasi dan validasi yang akan dilakukan oleh pihak berwenang. Namun, tidak hanya mendaftar lewat *online* saja masyarakat bisa langsung mendaftar PKH secara *offline* dengan mengunjungi kepala desa atau lurah di wilayah setempat dengan membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), kepala desa atau lurah akan mengirimkan data pendaftaran ke bupati atau wali kota melalui camat dengan melalui proses musyawarah desa atau kelurahan, dinas sosial akan melakukan verifikasi dan validasi data pendaftaran, data yang telah diverifikasi dan divalidasi akan dimasukkan ke dalam Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial (SIKS) merupakan aplikasi untuk menginput dan memperbarui data kemiskinan di setiap desa dan kelurahan dirancang sebagai alat yang efisien dan terpadu dalam manajemen informasi kemiskinan, oleh operator desa atau kecamatan, data yang sudah diinput ke dalam SIKS akan diproses oleh dinas sosial untuk dilakukan verifikasi dan validasi laporan kepada bupati atau wali kota, bupati atau wali kota akan mengumumkan hasil verifikasi dan validasi data yang telah disahkan kepada gubernur untuk selanjutnya diajukan kepada menteri sosial guna pengesahan.

Tabel 1 Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM)

Jumlah Penerima Keluarga Manfaat (KPM) Kota Bengkulu		
No	Kecama AN	Jumlah KPM
1	Gading Cempaka	625
2	Kampung Melayu	2.007
3	Muara Bangka Hulu	1.628
4	Ratu Agung	1.634
5	Ratu Samban	771
6	Selebar	2.339
7	Singaran Pati	1.311
8	Sungai Serut	914
9	Teluk Segara	1.078
Grand Total		12.307

Sumber: Dinas Sosial Kota Bengkulu Tahun 2023

Dilihat berdasarkan tabel di atas untuk jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kota Bengkulu mencapai 12.307 keluarga. Dimana kecamatan gading cempaka 625 keluarga penerima, kampung melayu 2.007 keluarga, muara bangka hulu 1.628 keluarga, ratu agung 1.636 keluarga, ratu samban 771 keluarga, selebar 2.339 keluarga, singaran pati 1.311 keluarga, Sungai serut 914 keluarga, teluk segara 1.078 keluarga. Data diatas diambil berdasarkan data tahun 2023 pada Dinas Sosial Kota Bengkulu.

Tabel 2 Jumlah Penerima PKH Kecamatan Ratu Agung

No	Kelurahan	Jumlah KPM	Jumlah Jiwa Anggota KPM PKH	Jumlah Kelompok PKH
1	Kebun Beler	140	488	6
2	Kebun Kenanga	209	643	8
3	Kebun Tebeng	145	456	5
4	Lempuing	265	759	6
5	Nusa Indah	133	406	4
6	Sawah Lebar	258	682	10
7	Sawah Lebar Baru	303	864	10
8	Tanah Patah	181	543	6
Total		1.634	4.841	55

Sumber: Dinas Sosial Kota Bengkulu Tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas jumlah persentase Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Pada tahun 2023 mencapai sebanyak 1.634 keluarga penerima, jumlah jiwa anggota KPM PKH sebanyak 4.841 jiwa dan jumlah kelompok PKH mencapai sebanyak 55 kelompok di Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu. Adapun jumlah penerima PKH berdasarkan Komponen yaitu:

Berdasarkan dari tabel diatas bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) ini terdiri dari berbagai komponen, seperti: Bidang Kesehatan, Bidang Pendidikan, Lanjut usia, dan Disabilitas. Besaran bantuan kriteria PKH, bantuan akan dilakukan per triwulan, yakni januari, April, juli, dan oktober. Bantuan ini disalurkan melalui bank (BNI, BRI, MANDIRI, dan BTN). Dengan besaran bantuan kriteria PKH sebagai berikut: Ibu hamil Rp 3.000.000 per tahun (Rp750.000 per bulan), Anak usia dini Rp 3.000.000 per tahun (Rp 750.000 per bulan), Anak sekolah SD Rp 900.000 per tahun (Rp 225.000 per bulan), SMP Rp 1.500.000 per tahun (Rp 375.000 per bulan), SMA Rp 2.000.000 per tahun (Rp 500.000 per bulan), Lanjut Usia Rp 2.400.000 per tahun (Rp 600.000 per bulan), Disabilitas Rp 2.400.000 per tahun (Rp 600.000 per bulan).

Program Keluarga Harapan (PKH), Program perlindungan sosial melalui pemberian uang non tunai kepada Masyarakat yang kurang mampu, mereka yang berhak mendapatkan PKH seperti ibu hamil (menyusui), Balita, Paud, SD, SMP, SMA, Lansia, dan Disabilitas sesuai dengan syarat penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) serta terdaftar dalam data terpadu program



penanganan fakir miskin. Peserta PKH akan menerima bantuan apabila menyekolahkan anaknya dengan tingkat kehadiran tertentu, memeriksakan Kesehatan atau memperhatikan kecukupan gizi dan pola hidup sehat anak dan ibu hamil. Program semacam ini secara internasional dikenal sebagai *Program Conditional Cash Transfers* atau program bantuan tunai bersyarat.

Dalam jangka pendek Program ini diharapkan dapat mengurangi beban Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dan dalam jangka panjang diharapkan dapat memutus mata rantai kemiskinan antar generasi, sehingga generasi berikutnya dapat keluar dari perangkap kemiskinan. Faktor penting penunjang berjalannya program yaitu peran dari tim pendamping PKH. Dalam pelaksanaannya setiap RTSM (Rumah Tangga Sangat Miskin) yang menerima dana bantuan didampingi oleh pendamping dalam pengalokasian dana yang telah didapatkan agar tepat pada sasaran yaitu untuk Pendidikan dan Kesehatan. Peran pendamping PKH menjadi sangat penting karena mayoritas penerima dana PKH merupakan RTSM yang memiliki tingkat Pendidikan yang rendah sehingga membutuhkan fasilitas pendampingan. Proses pendampingan yang dilakukan oleh pendamping PKH merupakan agenda rutin yang harus dilakukan sebagai upaya mengarahkan RTSM agar tepat dalam penggunaan dana bantuan tersebut. Program Keluarga Harapan (PKH) di kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu sudah berlangsung sejak tahun 2018 dengan jumlah penerima bantuan atau keluarga penerima manfaat (KPM) berjumlah 1.250 keluarga.

Namun realisasinya masih belum efektif, Program Keluarga Harapan di Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu masih mengalami beberapa kendala, antara lain: kurangnya koordinasi secara langsung dari pihak pendamping PKH terhadap kondisi masyarakat penerima PKH, penerima bantuan belum tepat sasaran penyebabnya karena kurang adanya survei terhadap kondisi masyarakat penerima bantuan, dan dalam pemanfaatan dana bantuan PKH ini oleh keluarga penerima manfaat masih kurang tepat misalnya bantuan ini masih sering juga digunakan untuk keperluan diluar Pendidikan dan Kesehatan seperti membeli pakaian dan keperluan rumah tangga lainnya secara berlebihan serta masih adanya anak yang putus sekolah akibat dari rendahnya kesadaran orang tua tentang pentingnya pendidikan.

LANDASAN TEORI

Menurut Mahmudi (2005:92) berpendapat, "Efektivitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan, semakin besar kontribusi (Sumbangan) *ouput* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan". Tingkat efektivitas dapat dinilai dengan mengumpamakan antara target dan rencana yang sudah ditentukan dengan hasil yang dicapai, dengan usaha atau hasil pekerjaan tersebut itulah yang dapat dikatakan efektif. Namun apabila usaha atau hasil pekerjaan yang dikerjakan tidak dapat tercapai sesuai dengan apa yang direncanakan, maka hal itu dapat dikatakan tidak efektif. Menurut Budiani Dalam Nuraida (2019:155) menyatakan bahwa untuk mengukur efektivitas suatu program dapat dilakukan dengan menggunakan variabel-variabel sebagai berikut:

1. Ketepatan sasaran program, yaitu sejauhmana peserta program tepat dengan sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya.
2. Sosialisasi program, yaitu kemampuan penyelenggaraan program dalam melakukan sosialisasi program sehingga informasi mengenai pelaksanaan program dapat tersampaikan kepada Masyarakat.
3. Tujuan program, yaitu kemampuan responden dalam mengetahui tujuan dilaksanakannya program. Hal ini membuktikan bahwa sosialisasi yang dilakukan mengenai tujuan suatu program dapat dimengerti oleh Masyarakat.
4. Pemantauan program, yaitu kegiatan yang dilakukan pada saat atau setelah dilaksanakan program sebagai bentuk perhatian kepada peserta program

Dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No.01 Tahun 2018 Pasal 1 tentang PKH (Program Keluarga Harapan) adalah program yang memberikan bantuan terhadap Masyarakat yang kurang mampu atau memiliki ekonomi yang terbatas dengan memberikan bantuan berupa uang tunai. Program Keluarga Harapan adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh pusat data dan informasi kesejahteraan sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. PKH lebih dimaksud dengan upaya pembangun sistem perlindungan sosial penduduk miskin sekaligus sebagai upaya untuk memutuskan rantai kemiskinan yang menjadi masalah yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia. Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan Upaya pemerintah dalam menentukan program

kebijakan sosial penanggulangan kemiskinan Indonesia. Program ini didesain untuk meningkatkan kemampuan Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dalam mengakses kebutuhan dasar di bidang Pendidikan dan Kesehatan. Pemberian akses tersebut berlaku bagi generasi yang sedang tumbuh dan berkembang serta untuk Kesehatan ibu hamil, nifas dan menyusui. Yang menjadi fokus penelitian ini adalah Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu dengan menjabarkan fenomena yang terjadi di lapangan dengan menggunakan teori efektivitas menurut Budiani, yaitu ketepatan sasaran program, sosialisasi program, tujuan program, pemantauan program.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yang mempunyai karakteristik alami (*Natural Setting*) sebagai sumber data langsung deskriptif. Dalam penelitian ini peneliti mencoba mencari data dengan cara menemui langsung narasumber yang peneliti perlukan di Dinas Sosial Provinsi Bengkulu dan peneliti melakukan wawancara secara mendalam kepada pendamping PKH untuk mendapatkan informasi selain itu peneliti juga melakukan wawancara dengan beberapa masyarakat yang mendapatkan bantuan PKH yang ada untuk mendapatkan informasi-informasi mengenai Efektivitas Program Keluarga Harapan di Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu. Peneliti melakukan pengunjungan dan wawancara beberapa kali gunanya untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat.

Informan dalam penelitian ini ditentukan dengan metode *purposive sampling*, teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Pertimbangan tertentu yang dimaksud adalah memilih sumber data atau orang yang dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan, Sugiyono (2016:300). Informan yang dilibatkan merupakan orang yang dapat memberikan informasi tentang situasi dan kondisi, menguasai permasalahan secara mendalam, serta dapat dipercaya untuk menjadi sumber data.

Berdasarkan kriteria informan pokok seperti yang disebutkan oleh Spradley (Moleong, 2004:165) penulis memiliki kriteria tersendiri sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan yaitu:

1. Informan yang memiliki data dan informasi yang lengkap.
2. Orang yang mampu memberikan informasi yang mendalam dan rinci tentang Program Keluarga Harapan (PKH)
3. Orang yang terlibat secara langsung dalam interaksi sosial yang diteliti
4. Informan yang mempunyai cukup banyak waktu dan kesempatan untuk dimintai informasi.
5. Informan yang mendapat bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu.

Dalam proses pengumpulan data dilapangan pada penelitian ini digunakan teknik wawancara, dokumentasi, dan pengamatan untuk mendapatkan hasil yang diinginkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Pasal 1 Nomor 01 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH). Dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No.01 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan Pemerintah Indonesia telah melaksanakan Program Bantuan Tunai Bersyarat (BTB) yang saat ini dikenal dengan nama Program Keluarga Harapan (PKH) pada tahun 2007 adalah Program yang memberikan bantuan terhadap masyarakat yang kurang mampu atau memiliki ekonomi yang terbatas dengan memberikan bantuan berupa uang tunai. Untuk mengetahui Efektivitas Program ini, peneliti menggunakan teori menurut Budiani Dalam Nuraida (2019:155) yaitu Ketepatan sasaran program, Sosialisasi program, Tujuan program, dan Pemantauan program.

Ketepatan Sasaran Program

Dalam pelaksanaan suatu kegiatan atau program, ketepatan sasaran sangatlah penting. Hal ini berdasarkan teori dikemukakan oleh Budiani bahwa ketepatan sasaran program dilihat dari sejauh mana peserta program tepat dengan sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya. Ketepatan sasaran merupakan hal penting yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu program, program dapat dikatakan efektif apabila sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan atau tepat sasaran yaitu bagaimana suatu program yang dirancang oleh pengelola kepada kelompok sasaran dan sejauh mana suatu lembaga



berhasil merealisasikan sasaran yang hendak dicapai. Sasaran Program Keluarga Harapan yaitu peserta PKH yang telah dinyatakan lolos sebagai penerima bantuan PKH yang diberikan kepada keluarga miskin yang sumber datanya diperoleh dari desa dan keluarga miskin yang sesuai dengan kriteria penerima.

Target Penerima Program Keluarga Harapan

Target penerima program yaitu kelompok atau individu spesifik yang direncanakan untuk menerima manfaat dari suatu program atau intervensi. Target juga bisa didefinisikan sebagai manifestasi dari harapan, mimpi, dan tujuan ke depan. Siapa pun kita dan apa pun yang kita lakukan tentu memerlukan sebuah target, karena dengan punya target kita jauh lebih bisa fokus menentukan yang namanya pilihan. Target penerima bantuan ditentukan berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditetapkan oleh penyelenggara program untuk memastikan bahwa bantuan atau intervensi yang diberikan tepat dan efektif mengikuti pedoman umum Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2021-2024 dimana sasaran dari target program adalah keluarga prasejahtera atau yang lebih sering disebut keluarga tidak mampu. Dengan menetapkan target penerima yang jelas, program dapat lebih efektif dalam mencapai tujuannya dan memastikan bahwa sumber daya yang ada digunakan dengan efisien.

Target PKH yaitu keluarga miskin yang memenuhi kriteria tertentu dan membutuhkan bantuan sosial untuk meningkatkan taraf hidup mereka, dimana target penerima PKH sesuai dengan kriteria penerima. Melalui PKH, pemerintah memberikan bantuan tunai yang diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kesejahteraan keluarga tersebut.

Tabel 4 Jumlah masyarakat penduduk Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu

No	Kategori	Jumlah Penduduk Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu		
		Kecamatan	Jumlah	Persentase
1	Masyarakat Penduduk Kec. Ratu Agung	Ratu Agung	48.475 Jiwa Data BPS	$\frac{1615}{1634} \times 100 = 98,8\%$
2	Masyarakat Tergolong Miskin	Ratu Agung	1615 Jiwa Data BPS	
3	Keluarga Penerima Manfaat (KPM)	Ratu Agung	1.634 Jiwa Data Dinsos	
3	Target PKH	Ratu Agung	1615 jiwa	
4	Tepat Sasaran	Ratu Agung		98,8 %
Total KPM Yang Tidak Tepat Sasaran			20%	2%

Sumber: hasil penelitian Tahun 2024

Adapun kriteria penduduk miskin yang berhak mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah. Sesuai dengan Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 262/HUK/2022 tentang kriteria fakir miskin diantaranya:

1. Seseorang tidak memiliki tempat berteduh/tempat tinggal sehari-hari.
2. Kepala keluarga atau pengurus keluarga yang tidak bekerja atau tidak mempunyai pekerjaan tetap.
3. Pernah khawatir tidak makan atau tidak makan dalam setahun terakhir.
4. Pengeluaran kebutuhan makan lebih besar dari setengah total pengeluaran.
5. Tempat tinggal sebagian besar berlantai tanah atau plesteran.
6. Tempat tinggal sebagian besar berdinding bambu, kawat, papan kayu, terpal, kardus, dinding tanpa diplester, rumbia, atau seng.

7. Tidak memiliki jamban sendiri atau menggunakan jamban komunitas.
8. Sumber penerangan berasal dari listrik dengan daya 450 watt atau bukan listrik.

Tabel 5 Jumlah Penerima PKH Berdasarkan Komponen

Kelurahan	Rincian Komponen Kesehatan			Rincian Komponen Pendidikan			Rincian Komponen Kesejahteraan Sosial	
	Ibu Hamil	Balita	PAUD	SD	SMP	SMA	Lansia	Disabilit
Kebun Beler	-	25	9	56	45	55	30	4
Kebun Kenanga	2	38	11	87	44	53	54	9
Kebun Tebeng	-	7	5	45	44	40	41	11
Lempuing	-	35	13	90	48	61	97	8
Nusa Indah	1	1	4	45	44	36	33	4
Sawah Lebar	-	16	12	76	52	66	70	6
Sawah Lebar Baru	-	41	15	91	69	77	71	7
Tanah Patah	-	28	9	72	43	47	52	5
TOTAL	3	191	78	562	389	435	448	54

Sumber: Dinas Sosial Kota Bengkulu Tahun 2023

Berdasarkan dari tabel diatas bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) ini terdiri dari berbagai komponen, seperti: Bidang Kesehatan, Bidang Pendidikan, Lanjut usia, dan Disabilitas. Dimana, komponen Kesehatan kriteria ibu hamil total ada 3, Balita ada 191. Komponen Pendidikan kriteria anak SD total 562, Anak SMP 389, Anak SMA 435 dan Komponen Kesejahteraan Sosial Lansia 448 dan Disabilitas total 54. Data di setiap Kelurahan Kota Bengkulu.

Tabel 6 Besaran bantuan kriteria PKH

No	Besaran Bantuan Berdasarkan Kriteria Program Keluarga Harapan		
	Komponen	Kategori	Jumlah Bantuan
1	Kesehatan	Ibu Hamil Dan Anak Usia Dini	Rp 3000.000 Per Tahun Rp 750.000 Per Bulan
2	Pendidikan	SD	Rp 900.000 Per Tahun Rp 225.000 Per Bulan
		SMP	Rp 1.500.000 Per Tahun Rp 375.000 Per Bulan
		SMA	Rp 2.000.000 Per Tahun Rp 500.000 Per Bulan
3	Kesejahteraan Sosial	Usia Lanjut dan Disabilitas	Rp 2.400.000 Per Tahun Rp 600.000 Per Bulan

Sumber: Dinas Sosial Kota Bengkulu Tahun 2023



Berdasarkan dari tabel diatas, Besaran bantuan kriteria PKH, bantuan akan dilakukan per triwulan, yakni januari, April, juli, dan oktober. Bantuan ini disalurkan melalui bank (BNI, BRI, MANDIRI, dan BTN). Dengan besaran bantuan kriteria PKH sebagai berikut: Ibu hamil Rp 3.000.000 per tahun (Rp 750.000 per bulan), Anak usia dini Rp 3.000.000 per tahun (Rp 750.000 per bulan), Anak sekolah SD Rp 900.000 per tahun (Rp 225.000 per bulan), SMP Rp1.500.000 per tahun (Rp 375.000 per bulan), SMA Rp 2.000.000 per tahun (Rp 500.000 per bulan), Lanjut Usia Rp 2.400.000 per tahun (Rp 600.000 per bulan), Disabilitas Rp 2.400.000 per tahun (Rp 600.000 per bulan). Dari hasil wawancara dengan informan di atas, bahwa target penerima bantuan Program Keluarga Harapan ini adalah Masyarakat yang kurang mampu dalam keterbatasan ekonomi dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dipilih berdasarkan komponen kriteria penerima PKH dimana kriteria tersebut berdasarkan komponen Pendidikan, Kesehatan dan Sosial.

Sasaran Yang Dituju

Sasaran yang dituju adalah kelompok atau individu yang menjadi target utama dari suatu program kegiatan, atau intervensi. Dalam konteks Program Keluarga Harapan (PKH), sasaran yang dituju adalah keluarga miskin yang memenuhi kriteria tertentu untuk menerima manfaat dari program tersebut. Sasaran yang dituju ini ditetapkan untuk memastikan bahwa bantuan atau intervensi yang diberikan tepat sasaran dan dapat memberikan dampak positif yang maksimal kepada mereka yang paling membutuhkan. Dalam undang-undang No 24 Tahun 2004 mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi sosial ekonomi yang menyebabkan seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya. Hak-hak dasar tersebut meliputi:

1. Pangan
2. Kesehatan
3. Pendidikan
4. Pekerjaan
5. Perumahan
6. Air bersih
7. Pertanahan
8. Sumber daya alam
9. Lingkungan hidup
10. Rasa aman dari ancaman atau perlakuan kekerasan

Kemiskinan juga bisa diartikan sebagai kondisi ketidakmampuan ekonomi untuk memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat di suatu daerah. Kondisi ini ditandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok, seperti pangan, sandang, dan papan. Dari hasil wawancara dengan informan di atas, program ini sudah cukup bagus dan berjalan dengan semestinya namun, ditinjau dari segi sasarannya dapat dikatakan belum tepat sasaran. Dimana dalam konteks Program Keluarga Harapan (PKH), sasaran yang dituju adalah keluarga miskin yang memenuhi kriteria tertentu untuk menerima manfaat dari program tersebut. Sasaran yang dituju ini ditetapkan untuk memastikan bahwa bantuan atau intervensi yang diberikan tepat sasaran dan dapat memberikan dampak positif yang maksimal kepada mereka yang paling membutuhkan.

Sosialisasi Program

Kegiatan atau proses untuk memperkenalkan, menjelaskan, dan mempromosikan suatu program kepada masyarakat atau kelompok sasaran tertentu. Tujuannya agar informasi tentang Program Keluarga Harapan (PKH) dapat dipahami dengan baik, mendukung partisipasi aktif, dan mencapai tujuan yang diinginkan. Sosialisasi dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti seminar, workshop, brosur, media sosial, dan lainnya.

Menurut Soekanto dalam Lindriati dkk (2017:10) berpendapat sosialisasi merupakan proses sosial tempat seorang individu mendapatkan pembentukan sikap untuk berperilaku yang sesuai dengan perilaku orang-orang disekitar. Menurut Agustin (2014:12), sosialisasi merupakan sebuah proses seumur hidup yang berkenaan dengan bagaimana individu mempelajari cara-cara hidup, norma, dan nilai sosial yang terdapat dalam kelompoknya agar dapat berkembang menjadi pribadi yang diterima pada kelompoknya. Menurut Gunawan (2012:198), sosialisasi merupakan proses penyampaian sesuatu pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberi tahu atau mengubah sikap, pendapat, perilaku baik langsung maupun tidak langsung. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, untuk kegiatan sosialisasi tidak ada yang ada hanya pertemuan kelompok. Dimana tujuan diadakannya pertemuan kelompok Program Keluarga Harapan (PKH) yaitu untuk membantu masyarakat

memahami tujuan, manfaat, dan mekanisme program PKH, sehingga mereka dapat berpartisipasi dengan lebih efektif.

Sosialisasi memastikan bahwa informasi mengenai program ini tersedia secara luas dan terbuka, sehingga mengurangi potensi penyalahgunaan atau kecurangan. Pendamping PKH berperan penting dalam hal ini. Dari hasil penelitian diketahui pula bahwa pelaksanaan kegiatan sosialisasi bagi para calon penerima PKH itu tidak ada kegiatannya yang ada hanya kegiatan pertemuan kelompok yang dilakukan satu kali dalam satu bulan pertemuan dengan Keluarga Penerima Manfaat (KPM), Keluarga Penerima Manfaat (KPM) wajib menghadiri minimal satu kali dalam satu bulan pertemuan kelompok, untuk waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan pertemuan kelompok itu tergantung kesepakatan antara pendamping PKH dengan keluarga penerima manfaat. Setiap pendamping punya 7-15 kelompok dengan begitu pendamping PKH yang mempunyai inisiasi untuk menyepakati dengan KPM kapan pelaksanaan pertemuan kelompok dilaksanakan.

Pemantauan Program

Pemantauan merupakan pengawasan yang dilaksanakan pada Program Keluarga Harapan, dilakukan sebagai bentuk perhatian kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Pemantauan dilakukan agar dapat diidentifikasi ketika dalam pelaksanaannya program ini berbeda dengan rencana yang sudah ditetapkan, sehingga diketahui kekurangannya dan kemudian dicarikan solusi dari permasalahan itu. Dalam penelitian ini, berdasarkan teori ukuran efektivitas oleh Budiani dalam Nuraida (2019:155), pada indikator pemantauan program yaitu yaitu kegiatan yang dilakukan pada saat atau setelah dilaksanakan program sebagai bentuk perhatian kepada peserta program. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu telah berjalan dengan cukup baik dengan adanya kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Pendamping Program Keluarga Harapan dan Pengelola Program Keluarga Harapan.

Sejauh Mana Program Dilaksanakan

Diukur dalam eksekusinya yaitu perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program. Program Keluarga Harapan dapat dilaksanakan hingga selesai sesuai dengan tujuan dan rencana yang telah ditetapkan, keberhasilan pelaksanaan program ini juga bergantung pada faktor-faktor seperti ketersediaan sumber daya, dukungan dari pihak terkait, serta pengelolaan risiko dan tantangan. Dari hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu sejauh ini sudah berjalan dengan cukup baik, namun program ini belum berhasil mencapai tujuan utamanya. Dimana tujuan utamanya adalah untuk mensejahterakan masyarakat dan meringankan kemiskinan. Namun, pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang ekonominya rendah yang tidak mendapatkan bantuan dari Program Keluarga Harapan (PKH) ini.

Penilaian Program

Penilaian Program Keluarga Harapan (PKH) adalah proses evaluasi yang dilakukan untuk mengukur efektivitas dan dampak dari program bantuan sosial bersyarat ini. Proses evaluasi sistematis untuk menilai efektivitas, efisiensi, dan dampak dari suatu program. Tujuan utama dari penilaian ini adalah untuk memahami seberapa baik program keluarga harapan mencapai tujuan yang telah ditetapkan, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan di masa mendatang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu sudah berjalan dengan cukup baik, Namun Program Keluarga Harapan (PKH) ini khususnya di Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu untuk tujuan program PKH belum mencapai tujuan utamanya, dimana tujuan utamanya adalah untuk mensejahterakan masyarakat, memutus rantai kemiskinan dan membantu masyarakat yang ekonominya rendah untuk meringankan beban mereka.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis penelitian tentang Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu belum berjalan dengan efektif, karena belum semua masyarakat miskin menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan penerima bantuan masih belum tepat sasaran. Sedangkan target



- penerima bantuan program PKH adalah masyarakat yang ekonominya rendah atau kurang mampu dan penerima harus sesuai dengan komponen kriteria PKH.
2. Untuk pelaksanaan sosialisasi tidak ada yang ada hanya pertemuan kelompok, pertemuan kelompok Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu bisa dikatakan efektif, hal ini dilihat dari antusias penerima bantuan untuk hadir di acara kegiatan pertemuan kelompok dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dapat memahami dengan jelas apa itu program PKH.
 3. Dalam proses pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) belum berjalan dengan efektif karena program ini belum mencapai tujuan utamanya. Hal ini dilihat dari sasaran dan target penerima bantuan PKH, belum semua masyarakat miskin menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH). Dimana tujuan utamanya adalah untuk mensejahterakan rakyat dan memutus rantai kemiskinan dan masih ada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang menyalahgunakan uang bantuan tersebut.
 4. Dalam proses pemantauan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu semua sudah berjalan dengan cukup baik. karena setiap tahun dinsaos mampu menggraduasi 1000 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan setiap bulan dinsaos mengusulkan ada istilah KPM berdikari atau Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang sudah memiliki usaha sendiri dalam artian Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang sudah siap keluar dari program.

Saran

- Dari apa yang telah dijelaskan diatas, penulis menemukan saran-saran sebagai berikut:
1. Bagi penerima bantuan PKH hendaknya menggunakan dana yang diterima sebagaimana mestinya berdasarkan dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Seperti digunakan untuk hal-hal produktif misalnya membuka usaha kecil-kecilan untuk mendapatkan hasil atau keuntungan sehingga dapat membantu meningkatkan pendapatan.
 2. Terkait dengan pemilihan target atau sasaran untuk kedepannya lebih di perhatikan lagi supaya target atau sasaran sesuai dengan komponen kriteria penerima Program Keluarga Harapan (PKH).

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Grafindo Persada.
- Ateng, S. 1996. *Butir-butir Gagasan Tentang Penyelenggaraan Hukum Dan Pemerintahan Yang layak*. Citra Aditya Bakti.
- Ayu, Puja. P., et.al. 2023. 3 Efektivitas Dalam Pengawasan Asrama SMA Negeri Keberbakatan Olahraga Provinsi Bengkulu. *Profesional Jurnal Komunikasi dan Administrasi Publik*. Vol. 10 No. 2 (2023).
- Brayen Bakulu, Masje Pangkey, and Helly Kolondam. 2021. *Efektivitas Program Keluarga Harapan Sektor Pendidikan di Desa Hatetabako Kecamatan Wasile Tengah Kabupaten Halmahera Timur*. *Jurnal ISSN 2338-9613 JAP No. 101 Vol. VII 2021*.
- Creswell, J.W. 2010 *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: PT Pustaka Belajar.
- Creswell, Jhon W. 2016. *RESEARCH DESIGN Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Direktorat Jaminan Sosial, Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI. *Buku Kerja Pendamping Program Keluarga Harapan*. Ed. Revisi, 2012.
- Direktorat Jaminan Sosial, Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI. *Pedoman Umum Program Keluarga Harapan*. Ed. Revisi, 2013.
- Georgopolous dan Tannaembeu. 1995. *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga.
- Gibson, J,L, Ivancevich, J,M dan Donelly, J,Jr, 1984. *Organisasi dan Manajemen Perilaku Struktur dan Proses*. Edisi ke empat, Jakarta: Erlangga.
- Gibson, James L.1990. *Organisasi: Perilaku,Struktur,Proses (jilid II)*. Jakarta. Erlangga.
- Handyaningrat, S. 1999. *Pengantar Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Gunung Agung.
- Hartini, Yulia, Evi Lorita, Bando Amin C. Kader. 2021. Efektivitas Kinerja Pegawai Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bengkulu Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Kota Bengkulu Tahun 2018. *Profesional Jurnal Komunikasi dan Administrasi Publik*. Vol. 8 No. 2 (2021).

- Ikhroma Zahara Arda. 2022. *Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Pangkalan Koto Baru (Studi Pada Bidang Pendidikan di Nagari Pangkalan Koto Baru) Sumatera Barat*. Skripsi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik.
- Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 26/HUK/2022 Tentang Kriteria Fakir Miskin.
- Kuncoro, M. 2006. *Ekonomika Pembangunan: Teori, Masalah, dan Kebijakan*. Edisi 4, Cetakan I. Yogyakarta: UPPSTIM YKPN.
- Kurniawan, Agung. 2005. *Transformasi Pelayanan Publik. Pembaruan*. Yogyakarta.
- Mahmudi. 2010. *Efektivitas Organisasi*. Edisi Kedua. Penerbit STIM YKPN, Yogyakarta.
- Maipita, & Indra. 2014. *Mengukur Kemiskinan dan Distributor Pendapatan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Makmur. 2011. *Efktivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Moleong, L. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remadja Karya.
- Munthe, A. 2015. *Pentingnya Evaluasi Program di Institusi Pendidikan: Sebuah Pengantar, Pengertian, Tujuan, dan Manfaat*. Scholaria, 5(1), 1-14.
- Nuraida. 2019. *Efektivitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Cilasak Kabupaten Subang*. Jurnal Ilmu Administrasi Universitas Subang, Vol. 1 Issue 2, Desember 2019.
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No.01 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan.
- Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 55/22 Tanggal 18 September 2000 Tentang Deklarasi Milenium Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) (A/RES/55/22. United Nations Millennium Declaration)
- Surpalan, P. 1993. *Kemiskinan Di Perkotaan*. Yayasan Obor Indonesia.
- Sugiyono, 2019. *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung: ALFABETA.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian & Pengembangan*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Dasar 1945 Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Umum dan Mencerdaskan Kehidupan Bangsa.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Jaminan Sosial Nasional. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.